

## Pembiayaan Pendidikan Dalam Manajemen Administrasi Sekolah

**Muhammad Syarif Al Akbar<sup>1</sup>, Safira<sup>2</sup>, Dwi Noviani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: syarif031003@gmail.com, s23152426@gmail.com, dwi.noviani@iaiqi.ac.id

### Abstrak

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen yang berpengaruh untuk menunjang berbagai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Untuk Penelitian dilaksanakan bersifat kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi. Di dalamnya juga terdapat sumber pembiayaan pendidikan, dimana sumber pendidikan itu juga sangat diperlukan. Lembaga pendidikan merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dalam perencanaan pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan yaitu, biaya langsung dan tidak langsung. Dengan demikian pelaksanaan anggaran pendidikan tetap terlaksana. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Dan terakhir perlu adanya pengawasan, kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

**Kata Kunci :** *Pembiayaan Pendidikan, Perencanaan, Pengawasan*

### Abstract

*In the implementation of education can not be separated from the various components that influence to support various educational processes in order to achieve educational goals. The financial and financing component is an indicator of educational institutions achieving educational goals which is included in the study of education financing management. Problems that occur in educational institutions related to education financing management include limited sources of funds, stagnant program financing, not supporting the vision, mission and policies as written in the educational institution's*

*strategic plan. The research was carried out qualitatively, namely to describe a process of educational activities based on what happened. In it there are also sources of education funding, where education resources are also very much needed. An educational institution is a system consisting of a series of interrelated components. In financing planning, you must first understand the types of costs in financing terms, namely, direct and indirect costs. Thus the implementation of the education budget continues to be carried out. In implementing the education budget, what needs to be done is bookkeeping or accounting activities. And finally, there is a need for supervision. Financing oversight activities are known as auditing, namely activities related to the accountability activities of receiving, storing and paying or handing over money carried out by Treasurers to authorized parties.*

**Keywords:** *Education Financing, Planning, Supervision*

## **Pendahuluan**

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen yang berpengaruh untuk menunjang berbagai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan terlaksana dengan baik (Khasanah, Aravik, & Hamzani, 2022). Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan (Jumriani dkk., 2022).

Urgensi pendidikan bagi sebuah negara juga telah di antisipasi oleh indonesia dengan penerbitan undang-undang tentang pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan, dalam undang-undang tersebut di tetapkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pendidikan,

Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting dalam konteks adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia menurut amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk kebutuhan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik (Khasanah, Hamzani, & Aravik, 2022).

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya- biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diseluruh Indonesia.

Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap ke berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan seharusnya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada konsep diatas, maka masalah pembiayaan menjadi sangat strategis untuk dikaji. Masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan. Pengelolaan yang baik dalam pembiayaan pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan.

Upaya dalam mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang di terapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah mencapai visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perecanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. (Solehan, 2022)

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah eksplorasi terhadap sejumlah data baik itu data primer maupun data sekunder dengan langkah konkret sebagai berikut membaca serta menelaah secara mendalam data primer seperti, jurnal, artikel, dan makalah yang merupakan hasil penelitian disertasi yang terkait dengan Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Sementara itu, untuk data

sekunder, penulis membaca dan menelaah buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini, kemudian selanjutnya dianalisis.

Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai artikel, jurnal dan makalah yang di dalamnya mengkaji Manajemen Administrasi Sekolah. Setelah data itu terkumpul kemudian dilakukan sebuah pemilahan antara jurnal, artikel dan makalah yang membahas tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

## Pembahasan

### 1. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia(Amka, 2021) (Abbas dkk., 2022).

Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negeri berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri terdiri dari dana rutin, yaitu gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), serta dana yang berasal dari masyarakat, naik yang berasal dari orang tua siswa, dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha.

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk

penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi keuangan.

Menurut Jones (1985), manajemen keuangan meliputi: (MAHARANI & Afriansyah, 2019)

1. Perencanaan financial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan.
2. Pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
3. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan.

## **2. Perencanaan Anggaran dan Belanja Lembaga Pendidikan**

Lembaga pendidikan merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil (Subiyakto dkk., 2022). Salah satu cara berpikir, berkaitan dengan pengelolaan dana lembaga pendidikan adalah kreatif dan dinamis selaras dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, yang dikenal dengan manajemen strategis. Rowe (1990) mengemukakan tiga langkah utama pendekatan strategis dalam konteks manajemen yaitu :

1. Strategic planning sebagai dokumen formal.
2. Strategic management sebagai upaya untuk mengelola proses perubahan.
3. Strategic thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil yang dicapai secara berkesinambungan.

Dalam perencanaan pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan. Jenis-jenis biaya tersebut yaitu:

1. Biaya langsung (direct cost) Merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga meliputi biaya yang dikeluarkan

untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.

2. Biaya tidak langsung (indirect cost) Biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Dalam mengukur biaya pendidikan ada yang dinamakan sebagai total cost dan unit cost. Total cost merupakan biaya pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan unit cost adalah biaya satuan per peserta didik. Untuk menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Sedangkan pendekatan mikro berdasar pada alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan peserta didik.

Untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran, hal-hal yang harus diperhatikan :

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan financial.
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang.
- f. Melakukan revisi usulan anggaran.
- g. Persetujuan revisi anggaran.
- h. Pengesahan anggaran

Penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan selalu berpatokan pada sistem penganggaran, sedangkan penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran (budgeting). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam penganggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Dalam melaksanakan kegiatan penganggaran perlu dilakukan dengan baik dan bermusyawarah(Muhaimin & Abbas, 2022).

### **3. Pelaksanaan Anggaran Pendidikan**

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan mencakup dua hal yaitu: pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan ke dua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Ada beberapa komponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi :

1. Honorium untuk pemimpin/penanggung jawab edukatif.
2. Honorium untuk sumber belajar.
3. Honorium untuk pemimpin umum lembaga diklusemas.
4. Honorium untuk pinata usaha dan pembantu-pembantunya.
5. Biaya perlengkapan dan peralatan.
6. Biaya pemeliharaan prasarana dan sarana.
7. Biaya sewa/kontrak.
8. Dana untuk pengembangan usaha lembaga diklusemas.
9. Biaya-biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak teduga.

Strategi suatu lembaga pendidikan secara administrasi dengan bagaimana seseorang memimpin melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber biaya yang terdapat di lingkungan suatu lembaga. Pengelola pendidikan harus mampu sebaik mungkin mencari pemasukan keuangan guna memenuhi kebutuhan dalam pendanaan pendidikan.

#### 4. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu.
2. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekom.

#### Simpulan

Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaanya, skuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

### **Daftar Pustaka**

- Abubakar, 2012. Manajemen Keuangan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Andi, 2013. Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Lampung.
- Anwar, M. I. (1991). Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. Mimbar Pendidikan, 1(X), 28–33.
- Fatah, Nanang. 2012. Standard pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19(4), 565-578.
- Habibi, A., Putera, L., & Riswanda, N. (2022). Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah. Tugas Mata Kuliah Mahasiswa, 12-20.
- Khadijah, I. (2022). Pembiayaan Pendidikan Dalam Manajemen Administrasi Sekolah.
- Khasanah, N., Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2022). Pemikiran Pendidikan Progresif Abdul Munir Mulkhan Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Raudhah Proud To Be ...*, 7(1), 30–40. Retrieved from <http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/156>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep dan Jenis Pembiayaan Pendidikan. Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(1).
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2), 594-601.